



Pemerintah Kabupaten
Jombang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2024



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

J. K.H. WAHID HASYIM NO. 137 JOMBANG
www.bkpsdm.jombangkab.go.id

KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang tahun 2024. Penyusunan LKjIP ini dilakukan guna memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

Laporan ini merupakan laporan kinerja dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai tolak ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai instansi teknis dilingkungan pemerintah Kabupaten Jombang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai merupakan hasil kerja keras dari semua pihak yang terlibat. Selanjutnya diharapkan LKjIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang Tahun 2024 ini dapat dijadikan media untuk membangun komitmen bersama yang dilandasi sikap kekeluargaan, kejujuran, dan ketulusan untuk berbuat yang terbaik bagi pembangunan Kabupaten Jombang. Selanjutnya, kami menyadari bahwa penyusunan LKjIP masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, masukan dan kritik yang membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang yang telah melaksanakan program kerja tahun 2024 sehingga tujuan dan sasaran yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai harapan.

Semoga penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang ini

menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya sehingga segala sesuatu yang telah diamanatkan oleh rakyat dapat dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya dan aparatur pemerintah daerah pada khususnya.

Jombang, 20 Maret 2025



BAMBANG SUNTOWO, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670904 199202 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Hal i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	8
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	22
1.1 Capaian Kinerja Organisasi	22
1.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ...	23
1.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir	25
1.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah	26
1.1.4 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional / internasional	28
1.1.5 Analisis atas realisasi kinerja	29
1.2 Realisasi Anggaran	34
1.2.1 Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran ...	34
1.2.2 Efisiensi penggunaan sumber daya	35
1.3 Upaya Perbaikan Kinerja	43
BAB IV : PENUTUP	44
LAMPIRAN:	
1. Perjanjian Kinerja	
2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	
3. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja	
4. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi	
5. Pengukuran Kinerja	

BAB I

PENDAHULUAN

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna dan bertanggungjawab (akuntabel).

Pembangunan aparatur negara mencakup aspek yang luas. Dimulai dari peningkatan fungsi utama pemerintahan, kelembagaan yang efektif dan efisien dengan tata laksana yang jelas dan transparan dilaksanakan oleh sumber daya manusia aparatur yang profesional serta memiliki akuntabilitas kepada mitra kerja (stake holder). Pendayagunaan aparatur pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan dan pengendalian manajemen pemerintahan secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur negara dalam rangka menuju tata pemerintahan yang baik (good governance). Upaya reformasi aparatur salah satunya ditempuh dengan penataan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Dalam upaya pengembangan kepegawaian dilaksanakan dengan penyempurnaan manajemen kepegawaian, peningkatan penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia serta pembangunan sistem informasi manajemen kepegawaian.

Mendasar pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang maka dalam rangka mempertanggungjawabkan semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang Tahun 2024. Penyusunan laporan ini juga merupakan keinginan

yang kuat dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan keseimbangan antara akuntabilitas, partisipasi dan transparansi yang merupakan pilar perwujudan tata pemerintahan yang baik.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berkedudukan sebagai unsur penunjang urusan Pemerintahan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mewujudkan Tujuan Pembangunan Daerah Jangka Menengah Tahun 2024-2026, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berperan menjalankan salah satu tujuan dari 4 tujuan yaitu **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik”** dengan sasaran **“Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi”** serta mendukung pencapaian Tema Pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2024 yaitu “Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Guna Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Agribisnis dan SDM Unggul dengan tiga prioritas pembangunan yang menjadi titik beratnya, salah satunya adalah “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketentraman Umum” dan salah satu upaya yang dilakukan dalam pencapaian prioritas dimaksud melalui kebijakan “Peningkatan Inovasi dan Profesionalisme ASN, ditempuh melalui reformasi birokrasi pengelolaan ASN melalui peningkatan kualitas manajemen ASN dalam Sistem Merit serta perwujudan profesionalitas ASN melalui program kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menginginkan bahwa setiap aparatur Pemerintah kabupaten Jombang memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas dengan baik, berdaya dan berhasil guna. Hal tersebut memerlukan dukungan dari kelembagaan perangkat daerah agar efektif dan efisien serta dukungan dari kecukupan jumlah aparatur yang memberikan pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan prima di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang.

Berdasarkan identifikasi masalah dan telaah akan dokumen terkait, terdapat isu-isu strategis pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu :

1. Profesionalitas ASN masih rendah;
2. Implementasi Sistem Merit Belum Optimal

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang berpedoman pada tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dalam mewujudkan cita-cita dan aspirasi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang, menyebutkan bahwa tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang adalah membantu tugas Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

2. Fungsi

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

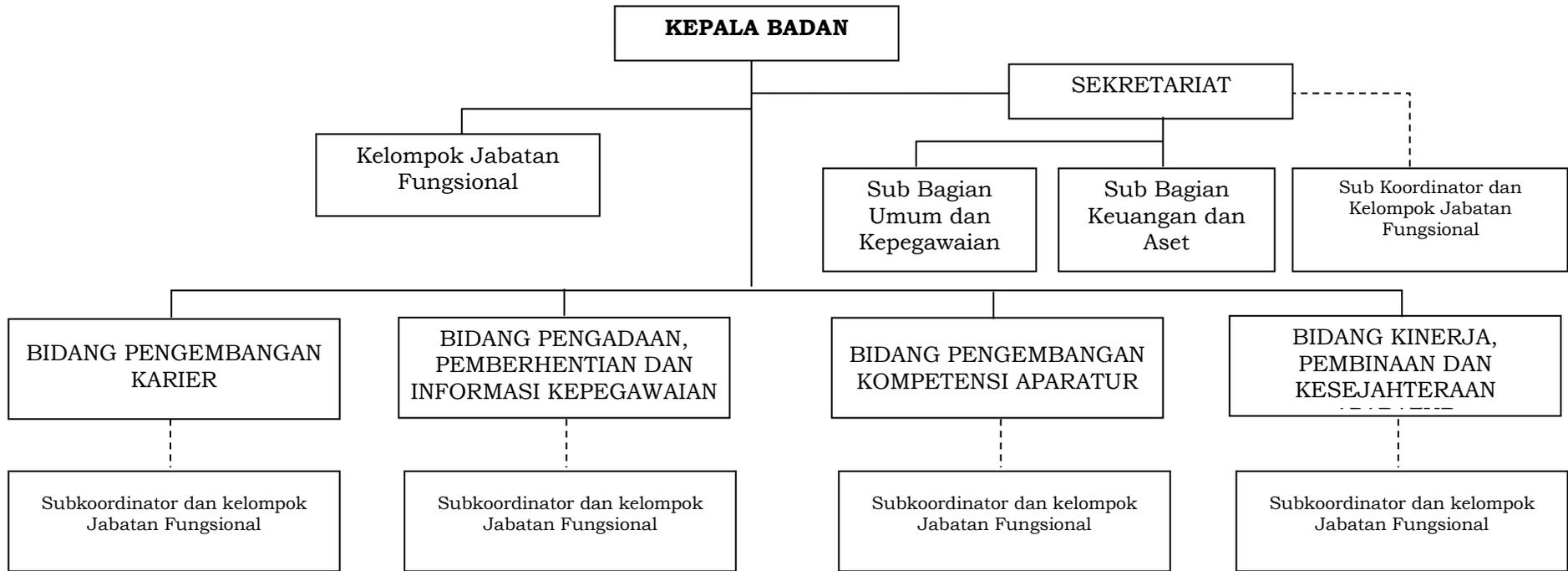
Dalam rangka mendukung Misi Tujuan Pemerintah Kabupaten Jombang untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang

mempunyai tujuan **Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi** yang mempunyai indikator **Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten** dengan target nilai tahun 2024 sebesar 69 dan **Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah** dengan target nilai tahun 2024 sebesar 71”.

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang Kabupaten Jombang terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pengembangan Karir, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Kinerja, Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1
 Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Kabupaten Jombang



————— : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang pada 31 Desember 2024 berjumlah 42 orang dengan rincian personil pegawai, mulai dari jabatan eselon II, eselon III, eselon IV, jabatan fungsional dan pelaksana serta honorer adalah sebagaimana tersaji dalam beberapa tabel berikut:

Tabel 1.1
Pegawai Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV

No.	Nama	NIP	Jabatan
1	BAMBANG SUNTOWO , S.E., M.Si	196709041992021002	Kepala
2	Dra. SETYO ELOK WAHYUNI, M.KP	196710031992012001	Sekretaris
3	CHRIS MAYA RINELDA, ST., M.KP.	198010072002122004	Kepala Bidang Kinerja Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur
4	MOKH. IKHWAN, S.IP	197112181997031004	Plt. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur
5	SUPARYONO, SE, MM.	197007281998031007	Kepala Bidang Pengembangan Karir
6	MOKHAMAD BUDI SETIAWAN, SE, MM.	197902132006041011	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan informasi kepegawaian
7	NURUL RORAYANTI, S.H., M.E	197711121997032003	Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset
8	NORMA RAHMI, S.Sos	19761016 2001122002	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Tabel 1.2
Pegawai Jabatan Fungsional

No.	Nama	NIP	Jabatan
1	ACHMAD BASORI, S.Sos	196906241993021001	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
2	MOKH. IKHWAN, S.IP	197112181997031004	Asesor Sumber Daya Manusia Ahli Muda
3	ANDY KUSUMA, S.H	197401202009011001	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
4	MUFIDAH, S.Si.	197806122006042044	Perencana Ahli Muda
5	TRIANA WIDYASTUTI, S.IP., M.Si.	198809272007012001	Asesor Sumber Daya Manusia Ahli Muda
6	WAHANA AL FATWA , S.Sos. M.A.P.	198110022011011008	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda

No.	Nama	NIP	Jabatan
7	RENDYANTOKO RINALDI, S.Kom., M.KP.	198305022011011001	Pranata Komputer Pertama
8	ARISTA WIDYA NUGRAHA, S.Kom.	198710192015051001	Pranata Komputer Pertama
9	ARYS WAHYU SUSANTO, S.H.,M.E.	198303072015051001	Analisis Penegakan Integritas Dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur
10	ERIE RETNO HANDAYANI, S.H.	198004122015052001	Analisis Kepegawaian Pertama
11	YANUAR SITI RAHMAWATI, S.Psi.	199501132022032005	Ahli Pertama - Assessor Sdm Aparatur
12	DEDIK IRAWAN S.M	198703142024021006	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama (PPPK)

Sedangkan jumlah pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebanyak 22 orang dan 1 orang berstatus sebagai pegawai honorer.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada Tabel 2.1. Sedangkan Rencana Kerja yang diturunkan dari Renstra Strategis dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.1
RENCANA STRATEGIS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rensrra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi				Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten		69		72		75					Jombang
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah			Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	A	A	7.970.311.600	A	8.753.826.300	A	9.410.669.500	A	26.134.807.400	BKPSDM	Jombang
		5.03.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur BKPSDM	91%	93%	7.735.215.000	94%	8.517.894.500	95%	9.171.982.300	95%	25.425.091.800	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	60.000.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	15.000.000	3 dokumen	15.000.000	2 dokumen	15.000.000	8 dokumen	45.000.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	5 laporan	5.000.000	5 laporan	5.000.000	5 laporan	5.000.000	15 laporan	15.000.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	98%	100%	6.459.534.915	100%	7.246.129.100	100%	7.952.216.900	100%	21.657.880.915	BKPSDM	Jombang
				Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
		5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/Bln	48 Orang/Bln	6.289.031.415	48 Orang/Bln	7.063.995.100	48 Orang/Bln	7.769.732.400	48 Orang/Bln	21.122.758.915	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 dokumen	4 dokumen	166.998.000	4 dokumen	178.278.000	4 dokumen	178.278.000	12 dokumen	523.554.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 laporan	5 laporan	1.059.000	5 laporan	1.164.800	5 laporan	1.270.700	15 laporan	3.494.500	BKPSDM	Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rensrra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 laporan	16 laporan	2.446.500	16 laporan	2.691.200	16 laporan	2.935.800	48 laporan	8.073.500	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaporan aset yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	500.000	100%	500.000	100%	500.000	100%	1.500.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 laporan	12 laporan	500.000	12 laporan	500.000	12 laporan	500.000	36 laporan	1.500.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD	0	95%	33.600.000	95%	33.600.000	95%	33.600.000	95%	100.800.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.05.0001	Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	0	96 Stel	33.600.000	96 Stel	33.600.000	96 Stel	33.600.000	288 Stel	100.800.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	412.365.700	100%	415.279.400	100%	418.279.400	100%	1.245.924.500	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.784.000	1 Paket	6.784.000	1 Paket	6.784.000	3 Paket	20.352.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4 Paket	78.990.000	4 Paket	80.000.000	4 Paket	82.000.000	12 Paket	240.990.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga PD yang terfasilitasi	3 Paket	1 Paket	2.080.000	1 Paket	2.080.000	1 Paket	2.080.000	3 Paket	6.240.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	143.110.000	3 Paket	145.000.000	3 Paket	146.000.000	9 Paket	434.110.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	83.000.000	2 Paket	83.013.700	2 Paket	83.013.700	6 Paket	249.027.400	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	4.906.200	3 Paket	4.906.200	3 Paket	4.906.200	9 Paket	14.718.600	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	93.495.500	12 laporan	93.495.500	12 laporan	93.495.500	36 laporan	280.486.500	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	95%	95%	286.800.000	95%	266.000.000	95%	211.000.000	95%	763.800.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	65 Unit	286.800.000	17 Unit	266.000.000	9 Unit	211.000.000	91 Unit	763.800.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	241.730.985	100%	255.702.600	100%	255.702.600	100%	753.136.185	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	37 laporan	101.690.985	37 laporan	101.658.600	37 laporan	101.658.600	111 laporan	305.008.185	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	4 laporan	140.040.000	4 laporan	154.044.000	4 laporan	154.044.000	12 laporan	448.128.000	BKPSDM	Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rensrra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	95%	95%	280.683.400	95%	280.683.400	95%	280.683.400	95%	842.050.200	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	41.010.000	1 Unit	41.010.000	1 Unit	41.010.000	3 Unit	123.030.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	26 Unit	109.643.400	26 Unit	109.643.400	26 Unit	109.643.400	26 Unit	328.930.200	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0	1 Unit	80.000.000	1 Unit	80.000.000	1 Unit	80.000.000	3 Unit	240.000.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	46 Unit	119 Unit	50.030.000	119 Unit	50.030.000	119 Unit	50.030.000	357 Unit	150.090.000	BKPSDM	Jombang
	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	5.03.02		Indeks Profesionalitas ASN	64 poin	61,5 poin	14.472.322.600	61,82 poin	16.506.225.000	62,15 poin	17.133.769.000	62,15 poin	48.112.316.600	BKPSDM	Jombang
				Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit	275 poin	304 poin		312,5 poin		320,5 poin		320,5 poin			
		5.03.02.2	Kepegawaian Daerah	Nilai Penerapan Sistem Merit Bidang Kepegawaian	239.5 poin	267 Poin	3.308.101.900	273 Poin	3.822.530.000	279 Poin	4.029.008.000	279 Poin	11.159.639.900	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai Penerapan Sistem Merit Kewenangan Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Sistem Informasi Kepegawaian	92 poin	93 Poin	1.631.215.900	94 Poin	1.957.200.000	95 Poin	2.038.810.000	95 Poin	5.627.225.900	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 dokumen	2 dokumen	1.200.215.900	2 dokumen	1.300.950.000	2 dokumen	1.365.997.500	6 dokumen	3.867.163.400	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	595 dokumen	1 dokumen	305.000.000	1 dokumen	525.000.000	1 dokumen	535.000.000	3 dokumen	1.365.000.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	126.000.000	1 dokumen	131.250.000	1 dokumen	137.812.500	3 dokumen	395.062.500	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya	0	81%	809.886.000	81,25%	979.330.000	81,50%	1.084.098.000	81,50%	2.873.314.000	BKPSDM	Jombang
				Nilai Penerapan Sistem Merit Kewenangan Bidang Pengembangan Karir	0	67,5 Poin	-	70 Poin	-	72,5 Poin	-	72,5 Poin	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rensrra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	168 (Mutasi antar daerah=25, SK Pemberhentian=5, SK Mutasi Staf=135, SK Tugas Instansi Lain=3)	4 dokumen	214.886.000	4 dokumen	236.374.000	4 dokumen	260.015.000	12 dokumen	711.275.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	5.208 (KP=1.150, Berkala=4.058, Ujian KPPI=150)	5 dokumen	205.000.000	5 dokumen	341.600.000	5 dokumen	382.592.000	15 dokumen	929.192.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3 (selter=1x, pelantikan=2x)	2 dokumen	390.000.000	2 dokumen	401.356.000	2 dokumen	441.491.000	6 dokumen	1.232.847.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan peningkatan kompetensi	84 Poin	84,5 Poin	188.000.000	84,75 Poin	207.000.000	85 Poin	227.100.000	85 Poin	622.100.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	72 orang	50 orang	110.000.000	50 orang	121.000.000	50 orang	133.100.000	150 orang	364.100.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	400 orang	600 orang	78.000.000	600 orang	86.000.000	600 orang	94.000.000	1800 orang	258.000.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang berkinerja minimal baik	91%	75%	679.000.000	77%	679.000.000	80%	679.000.000	91%	2.037.000.000	BKPSDM	Jombang
				Persentase Penangan Pelanggaran disiplin ASN tahun berkenaan	90%	90%	-	93%	-	95%	-	95%	-		
				Nilai Penerapan Sistem Merit Kewenangan Bidang Kinerja	104 poin	106,5 poin	-	109 poin	-	111,5 poin	-	111,5 poin	-		
		5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8563 dokumen	5 dokumen	76.500.000	5 dokumen	76.500.000	5 dokumen	76.500.000	15 dokumen	229.500.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	1332 orang	303 orang	196.500.000	303 orang	196.500.000	303 orang	196.500.000	909 orang	589.500.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	16 orang	50 orang	406.000.000	50 orang	406.000.000	50 orang	406.000.000	150 orang	1.218.000.000	BKPSDM	Jombang
		5.04.02	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai Penerapan Sistem Merit Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	25,5 poin	37 Poin	3.306.262.000	39,5 Poin	3.929.868.700	41,5 Poin	3.694.091.500	41,5 Poin	10.930.222.200	BKPSDM	Jombang
		5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis sesuai dengan kebutuhan	100%	100%	918.071.500	100%	856.572.200	100%	942.229.500	100%	2.716.873.200	BKPSDM	Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Rensrra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	201 orang	241 orang	887.571.500	289 orang	825.000.000	346 orang	907.500.000	876 orang	2.620.071.500	BKPSDM	Jombang
		5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	2 dokumen	2 dokumen	30.500.000	2 dokumen	31.572.200	2 dokumen	34.729.500	6 dokumen	96.801.700	BKPSDM	Jombang
		5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase aparatur yang lulus sertifikasi pengembangan kompetensi manajerial/dasar	100%	100%	2.388.190.500	100%	3.073.296.500	100%	2.751.862.000	100%	8.213.349.000	BKPSDM	Jombang
				Nilai Penerapan Sistem Merit Kewenangan Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur	34,5 poin	37 Poin	-	39,5 poin	-	41,5 Poin	-	41,5 Poin	-		
		5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	265 orang	145 orang	415.500.000	322 orang	922.696.500	265 orang	759.362.000	732 orang	2.097.558.500	BKPSDM	Jombang
		5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 laporan	3 laporan	1.290.690.500	3 laporan	940.800.000	3 laporan	987.840.000	9 laporan	3.219.330.500	BKPSDM	Jombang
		5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	50 dokumen	2 dokumen	682.000.000	2 dokumen	1.209.800.000	2 dokumen	1.004.660.000	6 dokumen	2.896.460.000	BKPSDM	Jombang

Tabel 2.2
RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2024

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2023				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2023		Bertambah/(Berkurang)		Catatan			
							Target Renja 2023		Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)		K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	
							K	Rp.	K	Rp.								K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10-6)	13=(11-7)	14					
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							12.884.030.145			4.682.863.971			13.528.408.645			752.698.632	
5.03	KEPEGAWAIAN							9.957.747.745			3.814.647.977			10.497.305.473			627.113.860	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur BKPSDM	91	%	100,48	%	91	%	7.341.756.445	50	%	3.340.882.580	91	%	7.494.866.173	0	%	267.281.288
5.03.01.2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100	%	110	%	100	%	17.922.500	55,56	%	4.735.000	100	%	8.774.000	0	%	(16.726.000)
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	9	dokumen	4	dokumen	15.346.000	2	dokumen	3.295.000	3	dokumen	6.197.500	-1	dokumen	(10.302.500)
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Dokumen	20	dokumen	5	dokumen	2.576.500	3	dokumen	1.440.000	5	dokumen	2.576.500	0	dokumen	(6.423.500)
5.03.01.2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	98	%	100	%	98	%	6.454.534.415	50	%	3.030.580.891	98	%	6.457.744.415	0	%	76.484.320
		Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100	%	100	%	100	%		50	%		100	%		0	%	-
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53	orang/bulan	28	kali	53	orang/bulan	6.284.031.415	42	orang/bulan	2.943.946.891	44	orang/bulan	6.284.031.415	-9	orang/bulan	83.264.320
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	dokumen	24	kali	4	dokumen	166.998.000	2	dokumen	84.639.000	4	dokumen	171.528.000	0	dokumen	(5.460.000)
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	laporan	5	dokumen	3	laporan	1.058.900	3	laporan	915.000,00	3	laporan	1.058.500	0	laporan	-
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	16	laporan	21	dokumen	16	laporan	2.446.500	8	laporan	1.080.000	16	laporan	1.126.500	0	laporan	(1.320.000)
5.03.01.2.03	Administrasi barang milik Daerah pada perangkat Daerah	Persentase pelaporan aset yang tersusun sesuai aturan	100	%	100	%	100	%	410.500	100	%	-	100	%	200.000			(210.500)

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2023				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2023		Bertambah/(Berkurang)		Catatan				
			1	2	3	4	Target Renja 2023		Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)		K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.		
							K	Rp.	K	Rp.									
5.03.01.2.03.06	Penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1	Laporan	6	dokumen	1	Laporan	410.500	1	Laporan	0	1	Laporan	200.000	0	Laporan	(210.500)	
5.03.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD	100	%	0	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.03.01.2.05.02	Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi	54	Stel	0	Stel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	%	100	%	100	%	379.018.700	62.07	%	135.044.950	100	%	403.411.600	0	%	101.114.300	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	8	jenis	1	paket	4.000.000	1	paket	1.681.000	1	paket	5.008.000	0	paket	1.008.000	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	paket	7	jenis	5	paket	57.513.800	3	paket	18.070.500	5	paket	69.431.700	0	paket	(2.961.300)	
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga PD yang terfasilitasi	3	paket	12	jenis	3	paket	1.480.000	-	paket	-	3	paket	1.480.000	0	paket	-	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	paket	22	kali bulan	3	paket	143.110.000	3	paket	29.903.000	3	paket	110.110.000	0	paket	(27.500.000)	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	469	buku lembar	2	paket	83.013.700	2	paket	45.448.850	2	paket	83.481.700	0	paket	35.751.400	
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	dokumen	6	jenis	3	dokumen	4.906.200	3	dokumen	1.520.000	3	dokumen	4.906.200	0	dokumen	1.909.200	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	24	bulan	12	laporan	84.995.000	6	laporan	38.421.600	12	laporan	128.994.000	0	laporan	92.907.000	
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100	%	91,17	%	100	%	60.848.340	100	%	50.100.000	100	%	191.153.710	0	%	129.537.110	
5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	unit	39	unit	3	unit	60.848.340	3	unit	50.100.000	19	unit	191.153.710	16	unit	129.537.110	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	91,66	%	100	%	241.698.500	54,55	%	104.594.839	100	%	244.226.448	0	%	(1.461.142)	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	30	laporan	24	bulan	30	laporan	101.658.590	15	laporan	44.797.307	37	laporan	101.811.448	7	laporan	152.858	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2023				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2023		Bertambah/(Berkurang)		Catatan						
							Target Renja 2023		Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)												
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12=(10-6)	13=(11-7)	14
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	laporan	7	jenis	3	laporan	140.040.000	3	laporan	59.797.532	3	laporan	142.415.000	0	laporan	(1.614.000)			
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	95	%	100	%	95	%	124.015.200	52,53	%	15.826.800	95	%	189.556.000	0	%	(21.256.800)			
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	unit	1	unit	1	unit	41.010.000	-	unit	0	1	unit	41.010.000	0	unit	(17.149.200)			
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26	unit	29	unit	26	unit	109.643.400	8	unit	7.866.800	26	unit	99.783.400	0	unit	(9.210.200)			
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	-	-	2	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	72	unit	152	jenis	72	unit	36.670.000	44	unit	7.960.000	71	unit	48.762.600	-1	unit	5.102.600			
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks kualitas ASN	0,86		0,81		0,86		2.615.991.300			473.765.397	0,86		3.002.439.300	0		234.247.800			
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase usulan formasi yang diusulkan ke Kemenpan ASN	81	%	131	%	82	%	1.529.935.100	35,83	%	130.236.724	35	%	1.530.111.100	-47	%	(109.060.200)			
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	dokumen	2	dokumen	1	dokumen	37.789.000	1	dokumen	5.276.198	1	dokumen	28.757.000	0	dokumen	(10.898.000)			
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	dokumen	6	kegiatan	1	dokumen	1.149.555.900	-	dokumen	73.003.994	1	dokumen	900.151.600	0	dokumen	(241.496.500)			
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	595	dokumen	1170	SK	595	dokumen	214.082.500	314	dokumen	49.844.032	575	dokumen	432.350.500	-20	dokumen	96.454.000			
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	dokumen	3	modul	1	dokumen	121.972.000	-	dokumen	2.112.500	1	dokumen	168.852.000	0	modul	46.880.300			
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan layanan mutasi, promosi dan Kenaikan Pangkat	86	%	89,62	%	86	%	684.886.400	74,25	%	253.202.500	86	%	907.203.900	0	%	180.953.700			
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	168	dokumen	55 505	surat SK	168	dokumen	195.350.200	95	dokumen	14.897.500	168	dokumen	196.166.800	0	dokumen	(17.673.800)			
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	5208	dokumen	9.841 187	SK orang	5208	dokumen	195.350.200	3448	dokumen	65.337.500	5192	dokumen	248.973.100	-16	dokumen	77.462.100			

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2023				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2023		Bertambah/(Berkurang)		Catatan						
			Target Renja 2023		Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)		K		Rp.		K		Rp.								
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12=(10-6)	13=(11-7)	14
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3	dokumen	4	dokumen	3	dokumen	331.698.600	3	dokumen	172.967.500	5	dokumen	462.064.000	2	dokumen	121.165.400			
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan peningkatan kompetensi	87	%	91,85	%	90	%	144.280.000	81,16	%	21.051.651	90	%	123.962.500	0	%	(20.317.500)			
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	72	orang	359	orang	72	orang	93.676.000	70	orang	6.361.651	71	orang	58.228.500	-1	orang	(35.447.500)			
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	400	orang	1.393	SK	400	orang	50.604.000	264	orang	14.690.000	400	orang	65.734.000	0	orang	15.130.000			
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin ASN tahun berkenaan.	0,2	%	0,35	%	0,2	%	256.889.800	0,2	%	69.274.522	0,4	%	441.161.800	0,2	%	182.671.800			
		Persentase ASN yang memperoleh penghargaan	98	%	98	%	98	%			%		98	%		0	%	-			
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8563	dokumen	15.865	SKP	8563	dokumen	49.273.500	5519	dokumen	20.346.450	8563	dokumen	98.738.200	0	dokumen	48.007.700			
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	1332	orang	4.341	surat % kegiatan orang	1332	orang	175.366.800	1833	orang	32.117.250	1332	orang	175.366.800	0	orang	(5.734.700)			
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	16	orang	38	orang	16	orang	32.249.500	16	orang	16.810.822	30	orang	167.056.800	14	orang	140.398.800			
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											868.215.994			3.031.103.172	0		125.584.772			
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai dimensi kompetensi pada IP ASN	20		17,74		20		2.896.799.400			868.215.994	20		3.031.103.172	0		125.584.772			
5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	100	%	125,08	%	100	%	592.117.400	13,80	%	72.786.572	100	%	1.129.159.700	0	%	543.204.300			
5.04.02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	201	orang	1.061	orang	201	orang	566.024.600	31	orang	65.868.472	255	orang	1.118.128.100	54	orang	558.265.500			
5.04.02.1.01.04	Pembinaan, Pengekoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengekoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	2	dokumen	290	orang	2	dokumen	26.092.800	1	dokumen	6.918.100	2	dokumen	11.031.600	0	dokumen	(15.061.200)			

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2023				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2023				Bertambah/(Berkurang)		Catatan		
			Target Renja 2023		Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)		K		Rp.		K		Rp.		K	Rp.			
			6	7	8	9	10	11	12=(10-6)	13=(11-7)									
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase aparatur yang lulus sertifikasi dan pengembangan kompetensi manajerial	100	%	100,44	%	100	%	2.304.682.000	2,82	%	795.429.422	100	%	1.901.943.472	0	%	(417.619.528)	
5.04.02.2.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	265	orang	533	orang	265	orang	673.531.000	-	orang	14.876.500	275	orang	677.489.500	10	orang	3.735.500	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4	laporan	64	orang	4	laporan	1.290.690.500	-	laporan	780.552.922	4	laporan	1.179.155.972	0	laporan	(122.915.528)	
5.04.02.2.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	50	dokumen	547	orang	50	dokumen	340.460.500	3	dokumen	-	50	dokumen	45.298.000	0	dokumen	(298.439.500)	

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan perangkat daerah akan lebih baik, sehingga diharapkan semua kegiatan jelas arah dan tujuannya. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Badan Kepegawaian dan dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 serta dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024. Perubahan dilakukan mengacu pada hasil evaluasi kinerja tahun 2023 serta evaluasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan tribulan II Tahun 2024. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN	71
		Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit	327
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	A (81,05)

No	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Kepegawaian Daerah	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Bidang Kepegawaian	Nilai Penerapan Sistem Merit Bidang Kepegawaian	287,5 Poin	3.159.438.862
2	Program Pengembangan Sumber Daya	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	Nilai Penerapan Sistem Merit Bidang	39,5 Poin	2.122.169.580

No	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Manusia	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Sumber Daya Manusia		
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Terpenuhinya Capaian Kinerja Aparatur BKPSDM	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur BKPSDM	93%	7.402.222.410

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang menetapkan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU mengacu pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang. Adapun Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang sebanyak 2 Indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah Nilai Komponen Pembentuk Indeks Profesionalitas ASN atau 25%Nilai Dimensi Kualifikasi+40%Nilai Dimensi Kompetensi+30%Nilai Dimensi Kinerja+5%Nilai Dimensi Disiplin	Database Kualifikasi (Pendidikan) dan Kompetensi ASN dalam Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan (SIAP) ASN Laporan penilaian kinerja ASN Laporan Pelanggaran Displin ASN Hasil penilaian Indeks Profesionalitas ASN dari BKN Peraturan BKN RI Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks	Kepala BKPSDM

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	
		Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit	Jumlah skor penilaian 8 aspek penerapan sistem merit: Perencanaan kebutuhan Pengadaan Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi Pengelolaan Kinerja Pengembangan Talenta dan Karier Pengembangan Kompetensi Pemberian Penghargaan dan Pengakuan Pemberhentian	Laporan perencanaan kebutuhan ASN dan pelaksanaan, pengadaan serta pemberhentian ASN; Laporan penguatan budaya kerja dan citra institusi; Laporan pengelolaan kinerja, rekapitulasi penilaian kinerja, penghargaan dan pengakuan ASN; Laporan pengembangan talenta dan karier; Laporan pengembangan kompetensi ASN; Hasil penilaian Penerapan Sistem Merit Kabupaten Jombang dari Pemerintah Pusat	Kepala BKPSDM
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP BKPSDM dari Tim SAKIP kabupaten pada tahun berkenaan	Dokumen AKIP dan evaluasinya	Kepala BKPSDM

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai penetapan kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2024, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban. Guna mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) target kinerja dan sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan suatu informasi capaian target kinerja atas penetapan kinerja tersebut. Di bawah ini diuraikan capaian kinerja atas pencapaian sasaran strategis beserta indikator kerjanya sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kinerja tahun 2024.

1.1. Capaian Kinerja Organisasi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang menetapkan tujuan dan pengukuran kinerja sasaran sesuai dalam Matriks Renstra tahun 2025-2029. Adapun dalam Matriks Renstra tersebut terdapat satu tujuan yaitu **Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi** yang mempunyai indikator **“Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten”** dan **“Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah** dengan target nilai tahun 2024 masing-masing sebesar 69 dan 71. Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian PAN/RB namun sampai dengan pelaporan ini hasil penilaian dimaksud belum keluar sehingga kita isikan dengan N.A sedangkan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah didasarkan pada hasil penilaian dari Tim Kabupaten dengan hasil sebesar 80,98.

Capaian kinerja untuk Sasaran Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang Tahun 2024 yang pertama, yaitu: Meningkatkan Kualitas Manajemen ASN dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN sebesar 113,01 dimana dari target sebesar 71 teralisasi mencapai 80,24 masuk kategori sedang dan untuk indikator Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit sebesar 100% dimana dari target sebesar 327 tercapai sebesar 327.

Indeks Profesionalitas (IP) ASN Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024 berdasarkan pada penetapan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional II tanggal 9 Oktober 2024 Nomor:421/B-AK.04/SD/KR.II/2024 sedangkan Nilai Penerapan Sistem Merit atas penilaian mandiri yang dikeluarkan oleh Kepala

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan menggunakan indikator penilaian seperti tahun sebelumnya (Jumlah skor penilaian 8 aspek penerapan sistem merit: 1. Perencanaan kebutuhan, 2. Pengadaan, 3. Pengembangan Karir, 4. Promosi dan Mutasi, 5. Manajemen Kinerja, 6. Penggajian, Penghargaan dan Disiplin, 7. Perlindungan dan Pelayanan dan 8. Sistem Informasi, mengingat adanya transisi peralihan instansi penilai Sistem Merit dari KASN ke BKN dan sampai saat ini BKN belum melakukan penilaian kepada semua Kabupaten/Kota. Dan Peraturan Pemerintah sebagai pedoman dalam penilaian Sistem Merit dengan menggunakan indikator baru sebagaimana Undang-Undang No 20 Tahun 2023 belum ada sampai dengan saat ini. Bilamana mengacu pada hasil penilaian terakhir yang dilakukan KASN pada tahun 2023, nilai sistem merit Kabupaten Jombang sebesar 312 (Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 224/KEP.KASN/C/XI/2023).

Sasaran Strategis yang kedua, yaitu: Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah mencapai 100,25%, dimana dari target 81,05 (nilai A) tercapai 81,25 (nilai A) atau melampaui 0,2 Poin.

1.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1. Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	1. Indeks Profesionalitas ASN	71	80,24	113,01
	2. Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit	327	327	100
- Program Kepegawaian Daerah	Nilai Penerapan Sistem Merit Bidang Kepegawaian	287,5 Poin	287,5 Poin	100
- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai Penerapan Sistem Merit Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	39,5 Poin	39,5 Poin	100
2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	A (81,05)	A (81,25)	100 (100,25)

Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	93%	103,17	110,94

Berdasarkan tabel 3.1, perbandingan antara target indikator dan realisasinya, didapati bahwa sebagian besar indikator mencapai target yang telah ditetapkan yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Manajemen ASN

a. Indeks Profesionalitas ASN

Pada tahun 2024, target Indeks Profesionalitas ASN sebesar 71 dan tercapai 81,25 sehingga capaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN tahun 2024 sebesar 113,01%. Hasil ini tidak lepas dari upaya dan kerjasama yang baik antar bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melakukan updating data pegawai serta sinkronisasi data pada SIAP ASN dengan SIASN BKN, serta koordinasi secara intensif dengan perangkat daerah khususnya berkaitan dengan kualitas data masing-masing ASN serta dengan pihak BKN selaku pengelola data ASN pada aplikasi SIASN yang menjadi database dalam penghitungan Indeks Profesionalitas ASN

b. Hasil Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit

Pada tahun 2024, target Hasil Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit sebesar 327 dan tercapai 327 sehingga capaian kinerja Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit tahun 2024 sebesar 100%. Hasil ini tidak lepas dari kerjasama dan koordinasi yang baik antar bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta dengan pihak terkait yang menjadi mitra kerja sehingga target sistem merit yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran strategis ini mempunyai indikator Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dengan target nilai A. Capaian kinerja dari indikator ini pada tahun 2024 sebesar 100%, dimana dari target nilai A yang ditetapkan, telah terealisasi A. Namun bilamana dilihat dari capaian angka target, dimana dari target 81,05 tercapai 81,25 atau 100,25% melampaui target sebanyak 0,2 poin.

Keberhasilan dari sasaran ini dikarenakan semakin tingginya kesadaran Aparatur di lingkup lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang akan tugas pokok dan fungsinya serta akuntabel. Pencapaian kinerja sesuai dengan yang direncanakan dan diharapkan dalam tahun-tahun selanjutnya akan semakin meningkat sehingga pelayanan kepada masyarakat khususnya kepada aparatur sipil negara semakin berkualitas.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sangat berhasil.

1.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan 2 (dua) Tahun Terakhir

Tabel 3.2
Realisasi Kinerja Tahun 2022 s/d Tahun 2024

Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1. Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	1. Indeks Profesionalitas ASN	71	60,56	70,74	80,24
	2. Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit	327	295,5	312	327
- Program Kepegawaian Daerah	Nilai Penerapan Sistem Merit Bidang Kepegawaian	287,5 Poin	N.A	275 Poin	287,5 Poin
- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai Penerapan Sistem Merit Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	39,5 Poin	N.A	37 Poin	39,5 Poin
2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	A (81,05)	A (80,68)	A (80,86)	A (81,25)

Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	91%	100,48	103,93	103,17

Jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dan 2023 realisasi sasaran strategis pada tahun 2024 cenderung mengalami peningkatan. Pada indikator sasaran yang pertama dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN mengalami peningkatan sebanyak 19,68 poin bilamana dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 60,56 dan mengalami peningkatan 9,5 poin jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 70,74 dan indikator Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit mengalami peningkatan sebanyak 31,5 poin bilamana dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 295,5 dan mengalami peningkatan 15 poin jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 312.

Sedangkan pada indikator sasaran yang kedua dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah pada tahun 2024 terealisasi dengan nilai 81,25 predikat A yang mana sama dengan predikat pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan sebanyak 0,57 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 80,68 dan mengalami peningkatan 0,39 poin jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 80,86.

1.1.3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Jangka Menengah

Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/ Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
1. Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	1. Indeks Profesionalitas ASN	61,5	80,24	130,47

Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/ Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
	2. Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit	304 Poin	327 Poin	107,57
- Program Kepegawaian Daerah	Nilai Penerapan Sistem Merit Bidang Kepegawaian	267 Poin	287,5 Poin	107,68
- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai Penerapan Sistem Merit Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	37 Poin	39,5 Poin	106,76
2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	A (81,05)	A (81,25)	100,25
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	93%	103,17%	110,94

Berdasarkan realisasi kinerja pada tahun tahun 2024 sebagaimana yang tercantum pada tabel 3.3 yang membandingkan antara realisasi capaian kinerja sampai dengan akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang didapati bahwa dari tiga indikator sasaran sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu pada indikator Indeks Profesionalitas ASN dengan capaian sebesar 130,47%, indikator Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit dengan capaian sebesar 107,57% serta indikator kinerja Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dengan capaian sebesar 100,25%.

Selain itu pada indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota telah mencapai 110,94%, sedangkan indikator pada Program Kepegawaian Daerah mencapai 107,68% dan indikator pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia mencapai sebesar 106,76%. Dari semua indikator menunjukkan hasil yang baik dengan capaian lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan namun tetap diharapkan pada

tahun mendatang dapat tercapai lebih baik lagi dengan melakukan berbagai inovasi.

1.1.4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional / internasional

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan level nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi				Ket
		BKPSDM	BKN	BKN Kanreg II Jatim	BKD Provinsi Jawa Timur	
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	1. Indeks Profesionalitas ASN	80,24	N.A	86,02	89,59	
	2. Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit	327	380	N.A (Tidak Dihitung)	383	

Sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024, dimana dalam menjalankan roda pemerintahan mempunyai 5 prioritas kerja antara lain: (1) Pembangunan SDM; (2) Pembangunan Infrastruktur; (3) Reformasi Birokrasi; (4) Peyerderhanaan Birokrasi; dan (5) Transformasi Ekonomi. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2023 tanggal 31 Oktober 2023 merupakan salah satu output penting dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia. Hadirnya Undang-undang ini membuat manajemen kepegawaian di Indonesia berubah secara signifikan. Mulai dari seleksi CPNS hingga pengisian Jabatan Tinggi (JPT) diawasi dengan ketat dan pelaksanaannya berdasarkan Sistem Merit. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, Sistem Merit didefinisikan sebagai “Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi”. Penerapan Sistem Merit ini berlaku secara Nasional di Indonesia tak terkecuali Kabupaten Jombang.

Pada tahun 2024, realisasi kinerja sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang, Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN sebesar 80,24. Jika disandingkan dengan hasil nilai

yang dicapai oleh BKN Kanreg II Jawa Timur selaku Pembina dengan nilai 86,02 masih jauh meskipun secara realisasi sudah melampaui target yang telah direncanakan. Namun demikian nilai kedua instansi pemerintah dimaksud meskipun diatas Kabupaten Jombang masih lebih kecil jika dibandingkan dengan BKD Provinsi Jawa Timur yang mencapai nilai 89,59.

Sedangkan realisasi kinerja untuk indikator Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit sebesar 327. Jika disandingkan dengan hasil nilai yang dicapai oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan nilai 380 masih jauh meskipun secara realisasi sudah melampaui target yang telah direncanakan. Untuk BKN Kanreg Jatim selaku Pembina tidak dilakukan penilaian atas sistem merit tahun 2024 sehingga tidak diketahui nilainya atau masih . Namun demikian nilai yang dicapai BKN masih lebih kecil jika dibandingkan dengan BKD Provinsi Jawa Timur yang mencapai nilai 383.

Pemerintah Kabupaten Jombang dengan capaian 327 masuk dalam kategori predikat Sangat Baik. Dapat dikatakan bahwa nilai yang dicapai oleh BKPSDM Kabupaten Jombang relative baik meskipun masih dibawah BKN dan dan BKD Provins Jawa Timur, untuk itu kedepan diharapkan penerapan Sistem Merit bisa lebih optimal melalui berbagai macam inovasi sehingga dapat lebih meningkat dari tahun 2024.

1.1.5. Analisis atas realisasi kinerja

Akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang diukur berdasarkan realisasi kinerja atau capaian indikator dari sasaran strategis dan program-program yang dilaksanakan. Atas beberapa capaian keberhasilan/kegagalan dan/atau peningkatan/penurunan kinerja yang telah dicapai akan diuraikan penyebab keberhasilan maupun kegagalan serta peningkatan maupun penurunan kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis, Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN.

Indeks Profesionalitas ASN dan Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit sebagai indikator keberhasilan dari sasaran Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN mencapai masing-masing 113,01% dan 100% dari target 71 dan 327 tercapai masing-masing sebesar 80,24 dan 327.

Capaian Indeks Profesionalitas ASN meningkat sebesar 19,68 poin atau 32,50% bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 60,56 dan meningkat sebesar 9,5 poin atau 13,43% bila dibandingkan

dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 70,74. Capaian ini mendasar pada Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor:310/BM.02/SD/C.II/2024 tanggal 13 September 2024 perihal Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Instansi di Wilayah Kerja Kantor Regional BKN yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional II melalui surat Nomor:421/B-AK.04/SD/KR.II/2024. Keberhasilan peningkatan nilai ini disebabkan oleh:

1. Telah terbitnya Peraturan Perundangan ditingkat Nasional, sebagai Pedoman Pelaksanaan dan Penetapan Peraturan Perundangan di tingkat Daerah
2. Telah Terbentuknya Tim Pengukuran Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten melalui Surat Sekda Nomor : 188/591/415.41/2023 sehingga bisa mengawal penguatan IP ASN diseluruh Perangkat Daerah
3. Telah Terbentuknya Tim Penilai Capaian Kinerja Organisasi dalam Rangka Penetapan Pola Distribusi Predikat Kinerja melalui Surat Sekda Nomor : 188/10/415.10/2023 yang merupakan gabungan dari BAPPEDA, Inspektorat, BPKAD dan Bagian Organisasi, sehingga pendampingan pada OPD dapat berjalan lebih optimal.
4. Komitmen pimpinan daerah dalam memperkuat Pengelolaan Kedisiplinan, Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN serta Peningkatan Penguatan Indeks Profesionalitas ASN telah sesuai dengan ketentuan yang mendasari
5. Komunikasi dan kerjasama antar bidang BKPSDM yang terjalin dengan baik, sehingga memperlancar penyelesaian pekerjaan sesuai yang ditargetkan
6. Kesadaran PNS yang tinggi untuk meningkatkan kompetensi melalui peningkatan kualifikasi pendidikannya

Capaian Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit meningkat sebesar 31,5 poin atau 10,66% bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 295,5 poin dan meningkat sebesar 15 poin atau 4,81% bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 312 poin. Capaian ini mendasar pada Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor:224/KEP.KASN/C/XI/2023 tanggal 30 November 2023 tentang

Penetapan Kategori, Penilaian, Dan Indeks Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang. Keberhasilan peningkatan nilai ini disebabkan oleh:

1. Sudah maksimalnya capaian nilai aspek perencanaan kebutuhan serta aspek pengadaan masing-masing mempunyai nilai 40. Hal ini didukung oleh Komitmen Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Manajemen PNS maupun Peraturan Pemerintah Manajemen PPPK, dengan telah disusunnya peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka waktu lima tahun oleh PPK serta, rencana pemenuhan kebutuhan ASN berdasarkan jenis jabatan dengan mempertimbangkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sesuai dengan program prioritas pembangunan dan potensi daerah, rencana pengadaan ASN, kebijakan internal berupa standart operasional prosedur tentang tata cara penyusunan formasi sampai dengan pengadaan pegawai sesuai dengan peraturan perundangan, penerimaan ASN diumumkan secara luas melalui media sosial, penetapan hasil penerimaan ASN diumumkan secara terbuka dan transparan dan pegawai yang baru diangkat menjadi ASN ditempatkan sesuai dengan jabatan yang dilamar.
2. Adanya peningkatan pada aspek pengembangan karir sebanyak 12,5 poin, dari nilai 65 menjadi 77,5. Capaian ini didukung oleh peningkatan sub aspek Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/ kompetensi sebanyak 5 poin dari nilai 10 menjadi 15 dan peningkatan sub aspek Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi sebanyak 2,5 poin dari nilai 5 menjadi 7,5.
ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja sebanyak 2,5 poin dari nilai 5 menjadi 7,5 dan peningkatan pada sub aspek Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai dari nilai 5 menjadi 7,5. Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Jombang telah menyusun laporan kinerja ASN sebagai bahan informasi dalam melihat kesenjangan kinerja

ASN serta melakukan upaya pengembangan kompetensi ASN melalui program diklat yang sudah disusun berdasarkan analisis kebutuhan diklat diantaranya diklat manajerial atau kepemimpinan, diklat teknis dan diklat fungsional serta dilaksanakan praktik kerja/magang dalam rangka mempercepat pengembangan kompetensi ASN serta coaching dan mentoring di beberapa perangkat daerah.

3. Adanya peningkatan pada aspek promosi dan mutasi, khususnya pada sub aspek Ketersediaan kebijakan internal tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada talent pool dan rencana suksesi sebanyak 2,5 poin, dari nilai 5 menjadi 7,5. Hal ini didukung oleh adanya kebijakan internal (Peraturan Bupati) tentang pola karir (Peta Talenta) yang pada tahun 2023 disempurnakan sesuai dengan amanat perundang-undangan yang berlaku. Penilaian kinerja juga sudah menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan promosi, rotasi, mutasi dan pengembangan karir serta pengisian JPT telah dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif dengan cara menginformasikan setiap tahapan dalam JPT melalui media massa maupun media elektronik.
2. Sasaran Strategis, Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
Mendasar pada hasil penilaian tim SAKIP Kabupaten, nilai AKIP BKPSM tahun 2024 sama dengan tahun 2022 dan tahun 2023 masuk dalam kategori A, secara nilai mengalami peningkatan 0,57 poin atau 0,71%) dari nilai pada tahun 2022 yaitu 80,68 menjadi 81,25 dan mengalami peningkatan 0,39 poin atau 0,48% dari nilai pada tahun 2023 yaitu 80,86 menjadi 80,86. Peningkatan capaian ini disebabkan semakin tingginya kesadaran ASN lingkup BKPSDM khususnya dalam evaluasi dan penyusunan pelaporan serta pemanfaatan hasil evaluasi dalam menentukan target selanjutnya.
 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Pada tahun 2024, program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota mencapai 103,17% melebihi target yang ditetapkan sebesar 93%. Keberhasilan capaian ini dikarenakan adanya komitmen

semua level dalam mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan guna mendukung pencapaian sasaran perangkat daerah. Disamping itu juga adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar bidang, perangkat daerah terkait serta stakeholder.

4. Program Kepegawaian Daerah

Capaian program kepegawaian daerah pada tahun 2024 sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 267 poin. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2024 telah dilakukan penerapan sistem merit pada semua aspek khususnya pada Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja. Dalam hal pengadaan ASN, Pemerintah Kabupaten Jombang mengambil kebijakan berdasarkan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun meskipun keputusan jumlah formasi bergantung pada Kementerian PAN/RB dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran untuk gaji dan tunjangan ASN yang sangat bergantung dari jumlah DAU serta memperhatikan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana disebutkan dalam pasal 66 bahwa pegawai non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Dalam rangka mendukung amanah Undang-Undang tersebut pemerintah pusat melalui Surat Menteri PANRB Nomor B/3540/M.SM.01.00/2023 tanggal 21 Desember 2023 hal: Usulan Jumlah Kebutuhan ASN Tahun 2024, menginstruksikan untuk pengadaan ASN Tahun 2024 wajib memprioritaskan penataan pegawai non ASN dengan mensyaratkan bagi pelamar PPPK harus berasal dari pegawai non ASN instansi pemerintah. Mendasar pada hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jombang mengusulkan formasi pengadaan PPPK Tahun 2024 dengan mempertimbangkan kondisi eksisting pegawai non ASN. Hal ini juga karena semakin tingginya minat ASN dalam pengembangan kompetensi guna menunjang kinerjanya ditandai dengan semakin banyaknya ijin belajar yang diajukan oleh ASN Kabupaten Jombang.

5. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Nilai dimensi kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN tahun 2024 sebesar 28,82 atau mencapai 144,75% dari target yang ditetapkan sebesar 19,91 meskipun capaian ini masih jauh dari nilai maksimal yang semestinya sebesar 40 atau masih mencapai 72,05. Dalam hal peningkatan kompetensi ASN pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Jombang sudah melakukan berbagai upaya melalui program, kegiatan dan sub kegiatan khususnya dalam hal pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan dasar, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, melakukan sinkronisasi data kompetensi ASN pada aplikasi SI ASN serta menghimbau kepada semua OPD setiap menyelenggarakan pengembangan kompetensi disertai dengan penerbitan sertifikat kompetensi bagi pesertanya. Meskipun demikian dalam pelaksanaannya masih dijumpai beberapa kendala antara lain antara lain : (1) kesadaran PNS untuk mengembangkan kompetensi masih rendah, (2) perhatian dan dukungan atasan langsung terhadap pengembangan kompetensi staf kurang, (3) Adanya asumsi OPD/PNS bahwa Pengembangan kompetensi PNS hanya dilakukan/tanggungjawab BKPSDM, (4) OPD/PNS masih mengandalkan pengembangan kompetensi secara klasikal dalam mengatasi kesenjangan kompetensi sehingga memerlukan anggaran besar.

1.2. Realisasi Anggaran

Pada bagian ini diuraikan tentang pembiayaan, realisasi dan persentase atas pelaksanaan strategi pencapaian sasaran-sasaran dengan target yang telah ditetapkan di tahun 2024, sehingga untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tahun 2024 ini rincian dana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) BKPSDM Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor DPA: DPPA/A.3/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2024. Akuntabilitas Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaannya diuraikan dibawah ini:

1.2.1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	1. Indeks Profesionalitas ASN	71	80,24	113,01	5.281.608.442	4.504.453.371	85,29%
	2. Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit	327	327	100	5.281.608.442	4.504.453.371	85,29%
- Program Kepegawaian Daerah	Nilai Penerapan Sistem Merit Bidang Kepegawaian	287,5 Poin	287,5 Poin	100	3.159.438.862	2.597.027.265	82,20%
- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai Penerapan Sistem Merit Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	39,5 Poin	39,5 Poin	100	2.122.169.580	1.907.426.106	89,88%
2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	A (81,05)	A (81,25)	100 (100,25)	7.402.222.410	6.883.484.920	92,99%
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	93%	103,17	110,94	7.402.222.410	6.883.484.920	92,99%

Secara keseluruhan anggaran pelaksanaan dari program dan kegiatan dari belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang adalah sebesar Rp.12.683.830.852,00 dan dalam pelaksanaan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja telah terealisasi sebesar 89,78% yaitu sebesar Rp.11.387.938.291,00

1.2.2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1.2.2.1. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan/Anggaran

Sasaran Strategis-Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5
1. Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	1. Indeks Profesionalitas ASN	113,01	85,29	32,50
	2. Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit	100	85,29	17,25

Sasaran Strategis-Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5
- Program Kepegawaian Daerah	Nilai Penerapan Sistem Merit Bidang Kepegawaian	100	82,20	21,65
- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai Penerapan Sistem Merit Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	100	89,88	11,26
2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	100,25	92,99	7,81
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	110,94	92,99	19,30

1. Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN

Berdasarkan tabel diatas indikator kinerja sasaran 1 dari pagu anggaran sebesar Rp.5.281.608.442,00 terealisasi sebesar Rp.4.504.453.371,00 atau 85,29%. Sedangkan capaian kinerja sasaran tercapai 113,01% dan 100%. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan untuk sasaran 1 tercapai efisiensi sebesar $(113,01\%/85,29\%-1)\times 100\%=32,50\%$ dan efisiensi sebesar $(100\%/85,29\% - 1)\times 100\%=17,25\%$.

a. Program Kepegawaian Daerah

Pada Program Kepegawaian Daerah ini dari pagu anggaran sebesar Rp.3.000.476.800 terealisasi sebesar Rp.3.159.438.862,00 terealisasi sebesar Rp. 2.597.027.265,00 atau 82,20%. Sedangkan capaian kinerja tercapai 100%. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan untuk program ini tercapai efisiensi sebesar $(100\%/82,20\% - 1)\times 100\%=21,65\%$.

b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia ini dari pagu anggaran sebesar Rp.2.122.169.580,00 terealisasi sebesar Rp.1.907.426.106,00 atau 89,88%. Sedangkan

capaian kinerja tercapai 100%. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan untuk program ini tercapai efisiensi sebesar $(100\%/89,88\% - 1) \times 100\% = 11,26\%$.

2. Sasaran 2 dalam IKU BKPSDM yaitu Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator sasaran Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dengan hasil nilai A dan telah sesuai dengan target, sehingga ketercapaian sasaran 2 sebesar 100%. Bila dilihat dari angka tercapai sebesar 100,25% dari target 81,05 terealisasi 81,25. Ketercapaian kinerja sasaran 2 sebesar 100,25% dengan realisasi anggaran 92,99% sehingga untuk efisiensi capaian sasaran yang kedua ini sebesar $(100,25\%/92,99\% - 1) \times 100\% = 7,81\%$.

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ini dari pagu anggaran sebesar Rp.7.402.222.410,00 terealisasi sebesar Rp.6.883.484.920,00 atau 92,99%. Sedangkan capaian kinerja tercapai 110,94%. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan untuk program ini tercapai efisiensi sebesar $(110,94\%/92,99\% - 1) \times 100\% = 19,30\%$.

Pencapaian sasaran 1 dan sasaran 2, untuk realisasi anggaran 89,78%, rata-rata capaian kinerja sasaran 104,42%, sehingga efisiensi dapat dihitung dari rata-rata realisasi capaian kinerja di bagi dengan rata-rata realisasi anggaran di kurangi 1 dikalikan 100%, hasilnya $(104,42\%/89,78\% - 1) \times 100\% = 16,31\%$.

1.2.2.2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi yang efektif dan efisien adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dengan jumlah yang cukup dan mempunyai kualitas yang tinggi serta profesional sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Perencanaan SDM adalah sebagai

proses untuk menentukan jumlah dan jenis manusia yang dibutuhkan oleh organisasi dalam waktu dan tempat yang tepat serta melakukan tugas sesuai dengan yang diharapkan. Penyusunan SDM pada BKPSDM Kabupaten Jombang dimaksudkan untuk menjamin agar kebutuhan SDM dapat terpenuhi secara konstan, baik dari kualitas maupun kuantitas. Untuk itu perencanaan SDM sudah merupakan bagian integral dari fungsi manajemen SDM bahkan dianggap sangat vital bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja. Manajemen sumberdaya manusia adalah suatu proses merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan menghasilkan segala bentuk aktivitas kerja untuk dapat meningkatkan kinerja pegawai. Manajemen sumberdaya manusia dengan peningkatan kinerja sangat berkaitan erat, sehingga menjadi perhatian bagi unit kerja mengembangkan adanya peningkatan sumberdaya manusia sesuai dengan peningkatan kinerja yang dicapainya. Untuk melihat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya manusia digunakan pendekatan perbandingan jumlah pegawai yang ada dengan jumlah pegawai yang dibutuhkan (sesuai Analisa Jabatan/ANJAB) mendukung kinerja.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran didukung oleh 42 pegawai dengan satu pegawai berstatus honorer, jauh dari yang seharusnya sebagaimana jumlah kebutuhan pegawai pada dokumen Analisa Jabatan sebanyak 130 orang atau masih terpenuhi sebesar 32,31% dan terdapat kekurangan pegawai sebanyak 88 orang atau 67,69%.

Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Pemenuhan kebutuhan pegawai	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5
1. Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	1. Indeks Profesionalitas ASN	113,01	32,31	249,77

Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Pemenuhan kebutuhan pegawai	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5
	2. Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit	100	32,31	209,50
- Program Kepegawaian Daerah	Nilai Penerapan Sistem Merit Bidang Kepegawaian	100	32,31	209,50
- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai Penerapan Sistem Merit Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	100	32,31	209,50
2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	100,25	32,31	210,28
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	110,94	32,31	343,36

1. Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN

Berdasarkan tabel diatas, indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN pada sasaran 1 dari kebutuhan sumber daya manusia sebesar 130 orang terpenuhi sebanyak 42 orang atau 32,31%, dengan capaian kinerja tercapai 113,01%. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan untuk indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN pada sasaran 1 tercapai efisiensi sebesar $(113,01\%/32,31\% - 1) \times 100\% = 249,77\%$.

Untuk indikator kinerja Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit pada sasaran 1 dari kebutuhan sumber daya manusia sebesar 130 orang terpenuhi sebanyak 42 orang atau 32,31%, dengan capaian kinerja sasaran tercapai 100%. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan untuk indikator kinerja Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit pada sasaran 1 tercapai efisiensi sebesar $(100\%/32,31\% - 1) \times 100\% = 209,50\%$.

a. Program Kepegawaian Daerah

Pada Program Kepegawaian Daerah ini dari kebutuhan sumber daya manusia sebesar 130 orang terpenuhi sebanyak 42 orang atau 32,31%. Sedangkan capaian kinerja tercapai 100%. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan untuk program ini tercapai efisiensi sebesar $(100\%/32,31\% - 1) \times 100\% = 209,50\%$

b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia ini dari kebutuhan sumber daya manusia sebesar 130 orang terpenuhi sebanyak 42 orang atau 32,31%. Sedangkan capaian kinerja tercapai 100%. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan untuk program ini tercapai efisiensi sebesar $(100\%/32,31\% - 1) \times 100\% = 209,50\%$

2. Sasaran 2 dalam IKU BKPSDM yaitu Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator sasaran Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dengan hasil nilai A dan telah sesuai dengan target, sehingga ketercapaian sasaran 2 sebesar 100%. Bila dilihat dari angka tercapai sebesar 100,25% dari target 81,05 terealisasi 81,25. Ketercapaian kinerja sasaran 2 sebesar 100,25% dengan kebutuhan sumber daya manusia sebesar 130 orang terpenuhi sebanyak 42 orang atau 32,31% sehingga untuk efisiensi capaian sasaran yang kedua ini sebesar $(100,25\%/32,31\% - 1) \times 100\% = 210,28\%$.

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ini dari kebutuhan sumber daya manusia sebesar 130 orang terpenuhi sebanyak 42 orang atau 32,31%. Sedangkan capaian kinerja tercapai 110,94%. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan untuk program ini tercapai efisiensi sebesar $(110,94\%/32,31\% - 1) \times 100\% = 343,36\%$.

Efisiensi pencapaian sasaran 1 dan sasaran 2 dengan ketersediaan pegawai sebesar 32,31% dan rata-rata capaian kinerja sasaran 104,42% tercapai sebesar $(104,42\%/32,31\% - 1) \times 100\% = 223,18\%$.

1.2.2.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Pemenuhan kebutuhan sarpras	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5
1. Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	1. Indeks Profesionalitas ASN	113,01	86,19	31,12
	2. Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit	100	86,19	16,02
- Program Kepegawaian Daerah	Nilai Penerapan Sistem Merit Bidang Kepegawaian	100	86,19	16,02
- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai Penerapan Sistem Merit Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	100	86,19	16,02
2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	100,25	86,19	16,31
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	110,94	86,19	28,72

Pada BKPSDM Kabupaten Jombang, Ruang lingkup manajemen sarana prasarana meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penginventarisasian, pemeliharaan dan penghapusan sarana prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana kantor di lingkungan BKPSDM Kabupaten Jombang menjadi perhatian yang sangat serius, baik penyediaannya maupun efisiensi dalam pemanfaatannya.

Jumlah sarana dan prasarana BKPSDM Kabupaten Jombang tahun 2024 dalam mendukung pencapaian kinerja sebanyak 543 unit atau

sudah terpenuhi sebesar 86,19% dari total kebutuhan sarana dan prasarana sebanyak 630 unit sebagaimana yang tercantum pada Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang Nomor:000.2.3.2/703.1/415.41/2024 sehingga terdapat kekurangan sarana dan prasarana sebesar 87 unit.

1. Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN

Berdasarkan tabel diatas indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN pada sasaran 1 dari kebutuhan sarana prasarana sebesar 630 unit terpenuhi sebanyak 543 unit atau 86,19%. Sedangkan capaian kinerja sasaran tercapai 113,01%. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan untuk indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN pada sasaran 1 tercapai efisiensi sebesar $(113,01\%/86,19\% - 1) \times 100\% = 31,12\%$.

Untuk indikator kinerja Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit pada sasaran 1 dari kebutuhan sarana prasarana sebesar 630 unit terpenuhi sebanyak 543 unit atau 86,19%. Sedangkan capaian kinerja sasaran tercapai 100%. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan untuk indikator kinerja Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit pada sasaran 1 tercapai efisiensi sebesar $(100\%/86,19\% - 1) \times 100\% = 16,02\%$

a. Program Kepegawaian Daerah

Pada Program Kepegawaian Daerah ini dari kebutuhan sarana prasarana sebesar 630 unit terpenuhi sebanyak 543 unit atau 86,19%. Sedangkan capaian kinerja tercapai 100%. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan untuk program ini tercapai efisiensi sebesar $(100\%/86,19\% - 1) \times 100\% = 16,02\%$.

b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia ini dari kebutuhan sarana prasarana sebesar 630 unit terpenuhi sebanyak 543 unit atau 86,19%. Sedangkan capaian kinerja tercapai 100%. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan untuk program ini tercapai efisiensi sebesar $(100\%/86,19\% - 1) \times 100\% = 16,02\%$.

2. Sasaran 2 dalam IKU BKPSDM yaitu Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator sasaran Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dengan hasil nilai A dan telah sesuai dengan target, sehingga ketercapaian sasaran 2 sebesar 100%. Ketercapaian kinerja sasaran 2 sebesar 100%. Bila dilihat dari angka tercapai sebesar 100,25% dari target 81,05 terealisasi 81,25. Kebutuhan sarana prasarana sebesar 630 unit terpenuhi sebanyak 543 unit atau 86,19%. sehingga untuk efisiensi capaian sasaran yang kedua ini sebesar $(100,25\%/86,19\%-1)\times 100\% = 16,31\%$.

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ini dari kebutuhan sarana prasarana sebesar 630 unit terpenuhi sebanyak 543 unit atau 86,19%. Sedangkan capaian kinerja tercapai 110,94%. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan untuk program ini tercapai efisiensi sebesar $(110,94\%/86,19\%-1)\times 100\% = 28,72\%$

Pencapaian sasaran 1 dan sasaran 2, untuk ketersediaan sarana dan prasarana sebesar 86,19%, rata-rata capaian kinerja sasaran 104,42%, sehingga efisiensi dapat dihitung $(104,42\%/86,19\%-1)\times 100\% = 21,15\%$.

1.3. Upaya Perbaikan Kinerja

Dari hasil capaian kinerja diatas, untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun berikutnya perlu dilakukan berbagai upaya guna mendukung pencapaian target pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 antara lain:

- Penyelarasan Sistem E-Kinerja BKN dengan Aplikasi pemberian penghargaan kepada pegawai yakni Aplikasi TPP;
- Pemberian Predikat Kinerja Organisasi Sesuai Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, dengan melakukan Evaluasi atas Capaian SAKIP dan Capaian PK masing-masing perangkat daerah

- Peningkatan kapasitas, baik teknis maupun administrasi bagi pejabat struktural dan fungsional untuk meningkatkan kompetensi dalam penyusunan pengelolaan kinerja kepegawaian;
- Melakukan pemetaan kompetensi seluruh pegawai melalui assment pegawai;
- Memperdalam analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja seluruh pegawai agar kebutuhan pengembangan kompetensi benar-benar sesuai kebutuhan dan jalur pengembangan;
- Melakukan pengembangan kompetensi secara terjadwal dalam bentuk pelatihan klasikal, non klasikal, Coaching Klinik dan Mentoring;
- Menghimbau kepada Pegawai Negeri Sipil melakukan update data mandiri ASN (UDAMAS) ke aplikasi SIAP ASN khususnya data kualifikasi dan kompetensi.
- Melakukan sosialisasi terkait dengan kewajiban pengembangan kompetensi bagi seluruh ASN sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- Melakukan Evaluasi dan Monitoring secara berkala atas capaian dan kendala yang dihadapi serta berkoordinasi secara intensif dengan semua bidang;
- Penerapan Talent Pool dalam pengembangan karier pegawai;
- Berkoordinasi secara intensif dengan Kementrian PAN/RB berkaitan dengan perencanaan kebutuhan dan pengadaan ASN;
- Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian guna peningkatan layanan kepada ASN.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga merupakan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya good governance.

Dalam perseptif, LKjIP ini berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik tentang keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan kata lain Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan laporan kepada pihak publik / eksternal walaupun manfaatnya lebih banyak kepada pihak internal. Oleh karena itu penyajian informasi dalam laporan Kinerja Instansi Pemerintah harus dipertimbangkan untuk dapat dipergunakan oleh pihak luar.

Dari hasil penilaian, keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur melalui indikator kinerja sasaran berikut capaian kinerjanya, dengan pencapaian sesuai target yang telah ditetapkan, sehingga termasuk kategori “Sangat Berhasil”. Hasil evaluasi kinerja ini merupakan hasil evaluasi kinerja dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang, hal ini juga berarti bahwa kinerja dari pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang bisa dikatakan sangat baik, walaupun dalam beberapa hal masih ada hambatan atau kendala yang harus diperbaiki pada tahun-tahun mendatang secara terus-menerus.

Dalam upaya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang tahun 2024 masih ada beberapa hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan dari Pusat dan Instansi terkait sehingga sering kali kegiatan sudah dianggarkan namun tidak dapat diselenggarakan.

2. Koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan perlu ditingkatkan khususnya kegiatan yang dilaksanakan dengan jeda waktu yang mendesak.
3. Jumlah anggaran yang tersedia untuk meningkatkan sumber daya manusia aparatur perlu ditingkatkan.

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas diperlukan upaya-upaya penanggulangan antara lain sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait
2. Meningkatkan sumber daya manusia untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
3. Melakukan efektivitas penggunaan anggaran yang tersedia.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini merupakan laporan pertanggungjawaban Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang dalam usaha mencapai target sasaran yang telah ditetapkan. Diharapkan saran serta masukan dari semua pihak guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Jombang, 20 Maret 2025

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN JOMBANG**



BAMBANG SUNTOWO, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670904 199202 1 002

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 050/43/415.01/2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BAMBANG SUNTOWO, S.E., M.Si**
Jabatan : **Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.**
Jabatan : **Pj. Bupati Jombang**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 10 Januari 2024
PIHAK PERTAMA
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Ditandatangani secara elektronik



BAMBANG SUNTOWO, S.E., M.Si
NIP. 196709041992021002

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik



SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN JOMBANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	A (81.05)
2.	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN	71
		Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit	327

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Bidang Kepegawaian	Kepegawaian Daerah	Nilai Penerapan Sistem Merit Bidang Kepegawaian	287.5	2,857,695,346.00
2.	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai Penerapan Sistem Merit Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	39.5	2,208,945,320.00
3.	Terpenuhinya Capaian Kinerja Aparatur BKPSDM	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur BKPSDM	93 %	7,394,509,382.00

Jombang, 10 Januari 2024
PIHAK PERTAMA
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Ditandatangani secara elektronik



BAMBANG SUNTOWO, S.E., M.Si
NIP. 196709041992021002

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik



SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.

**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

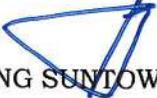
PEMERINTAH KAB. JOMBANG

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

NO		PEGAWAI YANG DINILAI		NO		PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	BAMBANG SUNTOWO, SE., M.Si.		1	NAMA	SUGIAT	
2	NIP	196709041992021002		2	NIP	-	
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b		3	PANGKAT/ GOL. RUANG		
4	JABATAN	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		4	JABATAN	Pj. Bupati Jombang	
5	UNIT KERJA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		5	UNIT KERJA	Pemerintah Kabupaten Jombang	
HASIL KERJA							
NO	RENCANA HASIL KERJA			INDIKATOR KINERJA INDIVIDU		TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)			(3)		(4)	(5)
UTAMA							
1	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Kinerja Perangkat Daerah (Penugasan dari Pj. Bupati)			Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah		A (81.05)	Penguatan Internal
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN (Penugasan dari Pj. Bupati)			Indeks Profesionalitas ASN		71 Poin	Penerima Layanan
				Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit		327 Poin	Penerima Layanan
3	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan ketentuan dan waktu yang ditetapkan. (Penugasan dari Pj. Bupati)			Nilai NSPK Manajemen ASN Kabupaten Jombang		80 Poin	Penerima Layanan
4	Terkelolanya anggaran BKPSDM Kabupaten Jombang Tahun 2024 sesuai dengan rencana kerja (Penugasan dari Pj. Bupati)			Persentase Realisasi anggaran BKPSDM Kabupaten Jombang Tahun 2024		90%	Anggaran
5	Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi (Penugasan dari Pj. Bupati Jombang)			Persentase penerapan Reformasi Birokrasi		100%	Penguatan Internal
TAMBAHAN							
6	Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jombang (Penugasan dari Pj. Bupati Jombang)			Tersusunnya perencanaan Penganggaran Kabupaten Jombang		100%	Anggaran
PERILAKU KERJA							
1	Berorientasi Pelayanan						

PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjadi role model/panutan dalam menunjang komitmen dan integritas pegawai di lingkungan kerjanya
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjadi role model/panutan dalam menunjang komitmen dan integritas pegawai di lingkungan kerjanya
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersedia untuk mengajarkan atau ketrampilan yang dimiliki/ kepada orang lain . - Menyelesaikan setiap pekerjaan sesuai dengan target dan standart kualitas yang ditetapkan
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Membangun komunikasi yang lebih terbuka dan menjaga hubungan baik dengan stakeholder
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berani menyampaikan adanya indikasi/ hal-hal yang dapat merugikan dan membahayakan Negara
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berani menyampaikan adanya indikasi/ hal-hal yang dapat merugikan dan membahayakan Negara
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: menciptakan suasana yang rekat antar pegawai melalui kegiatan rutin memberikan kesempatan kepada setiap anggota untuk menyampaikan ide atau pegawai yang produktif

Pegawai yang Dinilai


BAMBANG SUNTOWO , SE., M.Si.
196709041992021002

Jombang, 16 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja

SUGIAT

-

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

PENERINTAH KAB. JOMBANG

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA	
1.	Mebutuhkan Laptop
2.	Mebutuhkan Koneksi Internet
3.	Dukungan sarana dan prasarana yang memadai
4.	Mebutuhkan ATK
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN	
1.	Laporan kegiatan pembinaan / fasilitasi yang akan disampaikan setiap bulan
2.	Penunjang untuk menyelesaikan target pekerjaan yang akan dilaporkan pada akhir bulan
KONSEKUENSI	
1.	Akan dipertimbangka untuk promosi apabila memenuhi ekspektasi pimpinan

Pegawai yang Dinilai

Jombang, 16 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja


BAMBANG SUNTOWO, SE., M.Si.
196709041992021002

SUGIAT

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

- 1 NAMA : BAMBANG SUNTOWO, SE., M.Si
- 2 NIP : 19670904 199202 1 002
- 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Tingkat I
- 4 JABATAN : Kepala Badan
- 5 UNIT KERJA : BKPSDM Kab. Jombang

NO	KINERJA/RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TRIBUNAL 1		TRIBUNAL 2		TRIBUNAL 3		TRIBUNAL 4	
			RENCANA AKSI	TARGET						
1	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Kinerja Perangkat Daerah (Penugasan dari Pj. Bupati)	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	1 Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pemenuhan dokumen AKIP	1 kegiatan	1 Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pemenuhan dokumen AKIP	1 kegiatan	1 Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pemenuhan dokumen AKIP	1 kegiatan	1 Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pemenuhan dokumen AKIP	1 kegiatan
2	Terpenuhinya Capaian Kinerja Aparatur BKPSDM (Penugasan dari Pj. Bupati)	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur BKPSDM	1 Merumuskan kebijakan rencana kerja BKPSDM	1 kegiatan	1 Mengkoordinasikan penatausahaan keuangan	1 kegiatan	1 Merumuskan kebijakan rencana kerja BKPSDM	1 kegiatan	1 Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan	1 kegiatan
			2 Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan	1 kegiatan	2 Mengkoordinasikan penatausahaan keuangan	2	2 Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan	1 kegiatan	2 Mengkoordinasikan penatausahaan keuangan	1 kegiatan
			3 Mengkoordinasikan penatausahaan keuangan	1 kegiatan			3 Mengkoordinasikan penatausahaan keuangan	1 kegiatan		
3	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN (Penugasan dari Pj. Bupati)	Indeks Profesionalitas ASN	1 Merumuskan kebijakan serta mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan indeks profesionalitas ASN	1 kegiatan	1 Merumuskan kebijakan serta mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan indeks profesionalitas ASN	1 kegiatan	1 Merumuskan kebijakan serta mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan indeks profesionalitas ASN	1 kegiatan	1 Merumuskan kebijakan serta mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan indeks profesionalitas ASN	1 kegiatan
		Hasil Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit	1 Merumuskan kebijakan penerapan Sistem Merit	1 kegiatan					1 Mengkoordinasikan implementasi dan kecukupan dokumen penilaian Sistem Merit	1 kegiatan
4	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Bidang Kepegawaian(Penugasan dari Pj. Bupati)	Nilai Penerapan Sistem Merit Bidang Kepegawaian	1 Merumuskan kebijakan kepegawaian	1 kegiatan						
			2 Menertbitkan dokumen kepegawaian	1 kegiatan						
5	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia(Penugasan dari Pj. Bupati)	Nilai Penerapan Sistem Merit Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	1 Merumuskan kebijakan pengembangan kompetensi aparatur	1 kegiatan	1 Merumuskan kebijakan pengembangan kompetensi aparatur	1 kegiatan	1 Merumuskan kebijakan pengembangan kompetensi aparatur	1 kegiatan	1 Merumuskan kebijakan pengembangan kompetensi aparatur	1 kegiatan
			2 Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan kompetensi aparatur	1 kegiatan	2 Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan kompetensi aparatur	1 kegiatan	2 Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan kompetensi aparatur	1 kegiatan	2 Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan kompetensi aparatur	1 kegiatan
6	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan ketentuan dan waktu yang ditetapkan (Penugasan dari Pj. Bupati)	Nilai NSPK Manajemen ASN Kabupaten Jombang							1 Mengkoordinasikan pemenuhan dokumen penilaian NSPK	1 kegiatan
7	Terkelolanya Anggaran BKPSDM Kabupaten Jombang Tahun 2024 Sesuai Dengan Rencana Kerja (Penugasan dari Pj. Bupati)	Persentase Realisasi Anggaran BKPSDM Kabupaten Jombang Tahun 2024	1 Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran BKPSDM Tribunal I	1 kegiatan	1 Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran BKPSDM Tribunal II	1 kegiatan	1 Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran BKPSDM Tribunal III	1 kegiatan	1 Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran BKPSDM Tribunal IV	1 kegiatan

NO	KINERJA/RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TRIBULAN 1		TRIBULAN 2		TRIBULAN 3		TRIBULAN 4		
			RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET	
8	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi (Penugasan dari Pj. Bupati)	Persentase Penerapan Reformasi Birokrasi	1	Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pemenuhan dokumen penilaian Reformasi Birokrasi	1 kegiatan	1	Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pemenuhan dokumen penilaian Reformasi Birokrasi	1 kegiatan	1	Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pemenuhan dokumen penilaian Reformasi Birokrasi	1 kegiatan
9	Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jombang (Penugasan dari Pj. Bupati)	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran Kabupaten Jombang	1	Mengikuti Rapat koordinasi Tim Anggaran	1 kegiatan	1	Mengikuti Rapat koordinasi Tim Anggaran	1 kegiatan	1	Mengikuti Rapat koordinasi Tim Anggaran	1 kegiatan

Atasan Langsung

ttd

SUGIAT

Jombang, Januari 2024
Kepala Badan


BAMBANG SUNYOWO, SE., M.Si
NIP.19670904 199202 1 002

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
TRIBUNAL IV 2024**

1 NAMA : BAMBANG SUNTOWO, SE., M.Si
 2 NIP : 19670904 199202 1 002
 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Utama Muda
 4 JABATAN : Kepala Badan
 5 UNIT KERJA : Kepala Badan

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI PENDUKUNG
1	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Kinerja Perangkat Daerah (Penugasan dari Pj. Bupati)	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	1 Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pemenuhan dokumen AKIP	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Dokumen AKIP sudah di penuh sebagaimana peraturan yang ada dan mendapatkan nilai 81.25 kategori A	Menginstruksikan kepada semua bidang untuk tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku	Piagam Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024
2	Terpenuhinya Capaian Kinerja Aparatur BKPSDM (Penugasan dari Pj. Bupati)	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur BKPSDM	1 Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Dokumen Pagu Indikatif Penggunaan Anggaran (PIPA)Tahun 2026 Sudah Tersusun dengan mempedomani peraturan yang ada (SE Penyusunan Ranwal Renja PD Tahun 2026)	Menginstruksikan kepada semua bidang untuk mengawal Pagu Indikatif Penggunaan Anggaran (PIPA)Tahun 2026 yang telah disusun menjadi Rancangan Awal Renja 2026 dan memastikan target kinerja yang direncanakan sesuai dengan dokumen RENSTRA dan dapat dicapai pada tahun 2026	Rekapitulasi Dokumen PIPA Tahun 2026

			2	Mengkoordinasikan penatausahaan keuangan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Penyerapan anggaran sebagian sub kegiatan ada yang belum maksimal dikarenakan adanya kebijakan pusat dan mitra kerja khususnya terkait dengan mutasi JPTP melalui JobFit sebagaimana surat dari Kemendagri tanggal 10 Desember 2024 Nomor : 100.2.2.6/10073/OTDA, hal Tanggapan atas Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember	Menghimbau kepada semua bidang untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal sebagaimana anggaran kas dan berkoordinasi intensif dengan pihak terkait	Laporan realisasi keuangan TW IV Tahun 2024
3	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN (Penugasan dari Pj. Bupati)	Indeks Profesionalitas ASN	1	Merumuskan kebijakan serta mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan indeks profesionalitas ASN	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Nilai IP ASN Kabupaten Jombang Tahun 2024 mencapai 80.24 meningkat dibandingkan Tahun 2023	Mengintruksikan kepada bidang pengampu untuk terus melakukan monev IP ASN seluruh OPD agar bisa mengetahui kendala dan hambatan dalam pencapaian peningkatan nilai IP ASN	Surat Kepala Kantor Regional II BKN tanggal 9 Oktober 2024 Nomor:421/B-AK.04/SD/KR.II/2024 perihal Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023
		Hasil Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit	2	Mengkoordinasikan implementasi dan kecukupan dokumen penilaian Sistem Merit	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Sistem Merit sudah diterapkan di semua bidang dan teralisasi sebesar 327 Poin (100%) dari nilai yang direncanakan meskipun pada aspek pengembangan karier belum maksimal khususnya ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi	Menghimbau kepada seluruh bidang untuk terus menerapkan sistem merit secara optimal khususnya pada bidang pengembangan karier berkaitan dengan aspek pengembangan karier	Nilai Mandiri Penerapan Sistem Merit Tahun 2024

4	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Bidang Kepegawaian(Penugasan dari Pj. Bupati)	Nilai Penerapan Sistem Merit Bidang Kepegawaian	1	Merumuskan kebijakan kepegawaian	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Telah dilaksanakan seleksi pengadaan ASN, Perencanaan seleksi terbuka pengisian terhadap beberapa JPTP yang masih lowong, pemutasi antar daerah, pelaksanaan ujian dinas dan KPPI, Surat Edaran tentang Imbauan Menjaga Netralitas ASN dan Non ASN Pemerintah Kabupaten Jombang	Berkoordinasi secara intensif kepada bidang pengampu	Surat seleksi pengadaan ASN, Dokumen permohonan persetujuan mutasi JPTP ke Kemendagri, Surat ujian dinas dan KPPI, Surat Edaran tentang Imbauan Menjaga Netralitas ASN dan Non ASN Pemerintah Kabupaten Jombang
			2	Menertbitkan dokumen kepegawaian	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Sudah dilaksanakan layanan administrasi kepegawaian secara optimal	Semua Bidang diintruksikan untuk memberikan layanan kepegawaian secara prima	SK Pensiun BUP Oktober s/d Desember, SK Nominatif Kenaikan Pangkat, Rekapitulasi Surat Persetujuan Mutasi, Laporan Pengelolaan dan Penanganan Kasus Disiplin ASN, Surat Cuti
5	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia(Penugasan dari Pj. Bupati)	Nilai Penerapan Sistem Merit Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Merumuskan kebijakan pengembangan kompetensi aparatur	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Telah dilaksanakan pengembangan kompetensi teknis dan managerial ASN dan Latsar untuk CPNS	Berkoordinasi secara intensif dengan bidang pengampu kegiatan	Dokumen pengembangan kompetensi teknis dan managerial ASN dan Latsar untuk CPNS
			2	Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan kompetensi aparatur	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Jadwal penyelenggaraan menyesuaikan pada pihak penyelenggara	Berkoordinasi secara aktif dengan pihak penyelenggara	Surat Tugas dan fasilitasi pengembangan kompetensi teknis, managerial bagi ASN dan pendidikan dan pelatihan bagi CPNS
6	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan ketentuan dan waktu yang ditetapkan (Penugasan dari Pj. Bupati)	Nilai NSPK Manajemen ASN Kabupaten Jombang	1	Mengkoordinasikan pemenuhan dokumen penilaian NSPK	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Implementasi NSPK Manajemen ASN Kabupaten Jombang mendapatkan Nilai Indeks 81.90 dengan kategori B Predikat Baik	Menghimbau kepada semua ASN lingkup BKPSDM untuk meningkatkan penerapan NSPK Manajemen ASN	Surat BKN Nomor:9210 /B-AK.02.02/ SD/K/2024 Hal Hasil Pengawasan dan Pengendalian Implementasi NSPK Manajemen ASN Th 2023
7	Terkelolanya Anggaran BKPSDM Kabupaten Jombang Tahun 2024 Sesuai Dengan Rencana Kerja (Penugasan dari Pj. Bupati)	Persentase Realisasi Anggaran BKPSDM Kabupaten Jombang Tahun 2024	1	Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran BKPSDM Tribulan IV	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Terdapat Sebagian sub kegiatan Realisasi tidak sesuai dengan anggaran kas karena adanya kebijakan dari pusat	Menghimbau kepada semua bidang untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai anggaran kas yang telah disusun	Rekapitulasi Realisasi Anggaran BKPSDM Tribulan IV Tahun 2024

8	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi (Penugasan dari Pj. Bupati)	Persentase Penerapan Reformasi Birokrasi	1	Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pemenuhan dokumen penilaian Reformasi Birokrasi	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Reformasi Birokrasi sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi dan mendapatkan nilai sebesar 80.98 dengan predikat A- atau memuaskan dengan catatan	Menghimbau kepada semua bidang terus melaksanakan reformasi birokrasi pada semua aspek khususnya dalam hal pemberian layanan kepada ASN	Piagam Penghargaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024	
9	Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jombang (Penugasan dari Pj. Bupati)	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran Kabupaten Jombang	1	Mengikuti Rapat koordinasi Tim Anggaran	1 kegiatan	1 kegiatan	100			Undangan Rapat TAPD	
RATA-RATA CAPAIAN							100.00				

Atasan Langsung

ttd

Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, M.M

Jombang, Januari 2025
Kepala Badan



BAMBANG SUNTOWO, SE., M.Si
NIP.19670904 199202 1 002

**PENGUKURAN KINERJA
TRIBUNAL IV TAHUN 2024**

1 NAMA : BAMBANG SUNTOWO, SE., M.Si
 2 NIP : 19670904 199202 1 002
 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Utama Muda
 4 JABATAN : Kepala Badan
 5 UNIT KERJA : BKPSDM Kab. Jombang

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBULAN IV	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN				PENJELASAN	ALTERNATIF/ UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	
						NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)			% REALISASI
1	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah (penugasan dari Pj. Bupati)	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	A (81.05)	A (81.25)	100.25%	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7,402,222,410	6,883,484,920	92.99	Dokumen AKIP sudah dicukupi dan telah dilakukan Evaluasi oleh Tim Kabupaten dengan hasil diatas target yang ditetapkan dengan nilai sebesar 81.25 dengan kategori A	Memberi arahan dan menugaskan semua staf untuk secara aktif mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilaksanakan dengan menyiapkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan
2	Terpenuhinya capaian kinerja aparatur BKPSDM (penugasan dari Pj. Bupati)	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur BKPSDM	93%	93	100.00%	2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7,402,222,410	6,883,484,920	92.99	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana	Memberi arahan pada semua staf untuk melaksanakan tugas sesuai dengan rencana guna pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai BKPSDM

3	Terkelolanya anggaran BKPSDM Kabupaten Jombang Tahun 2024 sesuai dengan rencana kerja (penugasan dari Pj. Bupati)	Persentase Realisasi anggaran BKPSDM Kabupaten Jombang Tahun 2024	90%	89.78%	99.76%	3	-	-	-	-	Program, kegiatan dan sub kegiatan sudah berjalan dengan baik meskipun ada sebagian kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena berhubungan dengan kebijakan pusat khususnya terkait permohonan mutasi JPTP atas kosongnya jabatan yang lowong	Memberi arahan kepada semua bidang untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang direncanakan dan secara aktif berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
4	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN (penugasan dari Pj. Bupati)	Indeks Profesionaitas ASN	71	80.24	113.01%	4	Program Kepegawaian dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	5,281,608,442	4,504,453,371	85.29	Nilai Indeks Profesionalitas ASN melebihi target yang telah ditetapkan dengan nilai sebesar 80.24	Memberi arahan dan menugaskan bidang sesuai dengan tugasnya untuk melakukan evaluasi tribulanan atas capaian Indeks Profesional ASN di masing-masing OPD sehingga lebih cepat memberikan penanganan atau tindak lanjut atas permasalahan yang ada
		Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit	327 Poin	327 Poin	100.00%		Program Kepegawaian dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	5,281,608,442	4,504,453,371	85.29	Nilai Penerapan Sistem Merit mendasar pada penilaian mandiri mengingat KASN sudah tidak melakukan penilaian pada tahun 2024 dan dialihkan pada BKN namun hanya sampling kepada Kabupaten/Kota yang memiliki nilai tertinggi dan terendah ditahun 2023	Secara intensif memberi arahan dan menugaskan semua bidang untuk menerapkan sistem merit dan menyiapkan bukti dukung pelaksanaannya serta melakukan penilaian mandiri atas pelaksanaan sistem merit

5	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Bidang Kepegawaian (penugasan dari Pj. Bupati)	Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit Bidang Kepegawaian	287.5 Poin	287.5 Poin	100.00%	5	Program Kepegawaian Daerah	3,159,438,862	2,597,027,265	82.20	Nilai Penerapan Sistem Merit Bidang Kepegawaian mendasar pada penilaian mandiri mengingat KASN sudah tidak melakukan penilaian pada tahun 2024 dan dialihkan pada BKN namun hanya sampling kepada Kabupaten/Kota yang memiliki nilai tertinggi dan terendah ditahun 2023	Secara intensif memberi arahan dan menugaskan semua bidang untuk menerapkan sistem merit dan menyiapkan bukti dukung pelaksanaannya serta melakukan penilaian mandiri atas pelaksanaan sistem merit
6	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (penugasan dari Pj. Bupati)	Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	39.5 Poin	39.5 Poin	100.00%	6	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,122,169,580	1,907,426,106	89.88	Nilai Penerapan Sistem Merit Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mendasar pada penilaian mandiri mengingat KASN sudah tidak melakukan penilaian pada tahun 2024 dan dialihkan pada BKN namun hanya sampling kepada Kabupaten/Kota yang memiliki nilai tertinggi dan terendah ditahun 2023	Secara intensif memberi arahan dan menugaskan semua bidang untuk menerapkan sistem merit dan menyiapkan bukti dukung pelaksanaannya serta melakukan penilaian mandiri atas pelaksanaan sistem merit
7	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan ketentuan dan waktu yang ditetapkan (penugasan dari Pj. Bupati)	Nilai NSPK Manajemen ASN Kabupaten Jombang	80 Poin	81.90 Poin	102.38%	7	-	-	-	-	Nilai NSPK Manajemen ASN Kabupaten Jombang melebihi target yang telah ditetapkan dengan nilai sebesar 81.9	Memberi arahan dan menugaskan semua bidang untuk menerapkan NSPK Manajemen ASN beserta bukti dukung
8	Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi (penugasan dari Pj. Bupati)	Persentase penerapan Reformasi Birokrasi	100%	100%	100.00%	8	-	-	-	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana	Memberi arahan dan menugaskan semua bidang untuk menerapkan Reformasi Birokrasi beserta bukti dukung

9	Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jombang (penugasan dari Pj. Bupati Jombang)	Tersusunnya Perencanaan Penganggaran Kabupaten Jombang	100%	100%	100.00%	9	-	-	-	-	Telah dilakukan proses penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2025 serta perubahan perencanaan dan penganggaran tahun 2024	Secara aktif mengikuti proses penyusunan perencanaan dan penganggaran
RATA-RATA					101.54%							

Atasan Langsung

ttd

Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, M.M

Jombang, Januari 2025
Kepala Badan



BAMBANG SUNTOWO, SE., M.Si
NIP.19670904 199202 1 002